

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG

MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN

PRINSIP SYARIAH

**FORMAT 1 FORMULIR SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN**

INFORMASI UMUM		
Keterangan		Isian
Nama Perusahaan Pergadaian		
Lokasi Perusahaan Pergadaian	Alamat:	
	Kelurahan:	
	Kecamatan:	
	Kabupaten/Kota:	
	Provinsi:	
Contact Person	Nama:	
	Nomer Telepon/Fax:	
	E-mail:	
	Jabatan:	
Surat Keputusan OJK*)	Nomor:	
	Tanggal:	

PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN				
No	Persyaratan	Ya**)	Tidak**)	Keterangan***)
1.	Tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Memiliki metode penyelenggaraan kegiatan usaha lainnya ( <i>standar operational procedure</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN</b>				
<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Ya**)</b>	<b>Tidak**)</b>	<b>Keterangan***)</b>
5.	Memiliki kondisi keuangan yang memadai untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>ISI DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN</b>				
<b>No</b>	<b>Isi Dokumen</b>	<b>Ya**)</b>	<b>Tidak**)</b>	<b>Keterangan***)</b>
1.	Kegiatan usaha yang akan dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan disertai dengan akad yang akan digunakan setelah mendapat persetujuan dari DPS Perusahaan Pergadaian Syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Hak dan kewajiban para pihak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Analisis prospek kegiatan usaha lain			
5.	Contoh perjanjian yang akan digunakan			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Syariah.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
PT/Koperasi\*\*\*\*) .....

*tanda tangan*

(Nama Lengkap)

- \*) Surat Keputusan OJK merupakan Surat Keputusan pemberian izin usaha Perusahaan Pergadaian
- \*\*\*) Centang (√) salah satu kotak isian
- \*\*\*\*) Diisi penjelasan apabila memilih kotak isian 'Tidak'
- \*\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN  
DENGAN LOKASI PENDIRIAN DI WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANTEN**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Menara Merdeka  
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2  
Jakarta 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian SYariah, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain:

Nama : PT/Koperasi\*) .....  
Izin Usaha dari OJK : Nomor..... Tanggal.....  
Alamat : Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kota/Kabupaten.... Provinsi....  
No Telp/Fax : .....  
Email : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi uraian paling sedikit sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha yang akan dilakukan;
- b. prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan disertai dengan akad yang akan digunakan setelah mendapat persetujuan dari DPS Perusahaan Pergadaian Syariah;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. analisis prospek kegiatan usaha; dan
- e. contoh perjanjian yang akan digunakan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri.\*) ....., melalui alamat email..... atau nomor telepon.....

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/Koperasi\*).....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 3 PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN DENGAN LOKASI PENDIRIAN DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANTEN**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional/Kepala Kantor OJK\*)

.....\*\*)

.....\*\*\*)

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Syariah, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain:

Nama : PT/Koperasi\*) .....

Izin Usaha dari OJK : Nomor..... Tanggal.....

Alamat : Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kota/Kabupaten.... Provinsi....

No Telp/Fax : .....

Email : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi uraian paling sedikit sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha yang akan dilakukan;
- b. prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan disertai dengan akad yang akan digunakan setelah mendapat persetujuan dari DPS Perusahaan Pergadaian Syariah;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. analisis prospek kegiatan usaha; dan
- e. contoh perjanjian yang akan digunakan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri.\*) ....., melalui alamat email..... atau nomor telepon.....

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/Koperasi\*).....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Diisi nama Kantor Regional OJK atau nama Kantor OJK

\*\*\*\*) Diisi alamat Kantor Regional OJK atau nama Kantor OJK

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA  
PENSIUN, LEMBAGA  
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA  
JASA KEUANGAN LAINNYA,

FIRDAUS DJAELANI